

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan demikian maka terdapat tuntutan bagi kepala sekolah di sebuah lembaga pendidikan kejuruan/SMK yang harus mempunyai kecakapan untuk menggalang/menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Agar ketrampilan yang dipersiapkan dilembaga Sekolah Menengah Kejuruan tersebut dapat teruji ketrampilannya oleh lembaga lain. Dan ini adalah lembaga dalam bentuk magang.

Berdasarkan pandangan di atas maka permasalahan yang muncul adalah bagaimana upaya kepala sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Bubutan Surabaya sebagai institusi pendidikan terhadap pengembangan bekerjasama dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah melalui pendekatan tepat. Untuk dapat dilakukan hal-hal yang demikian, lembaga pendidikan (sekolah) pun perlu melakukan sebagai upaya kearah peningkatan peningkatan kualitas pendidikan secara kesinambungan.

Peran Kepala Sekolah dalam kerjasama yang dilakukan adalah dalam bentuk magang dan ada beberapa industri di Sekolah Menengah Kejuruan tersebut yang langsung bekerja ditempat mereka magang. sistem menjalin

peran Kepala Sekolah. Kepala Sekolah adalah pemimpin pendidikan yang mempunyai peranan sangat besar dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. Berkembangnya semangat kerja, kerjasama yang harmonis, minat terhadap perkembangan pendidikan, suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan, perkembangan mutu profesional di antara para guru banyak ditentukan kualitas kepemimpinan Kepala Sekolah.

Dalam satuan pendidikan, Kepala Sekolah menduduki dua jabatan penting untuk dapat menjamin kelangsungan proses pendidikan sebagaimana yang telah digariskan oleh perundang-undangan. Yaitu: *Pertama*, Kepala Sekolah adalah pengelola pendidikan di sekolah secara keseluruhan, dan *Kedua*, Kepala Sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di sekolahnya.

Sebagai pengelola pendidikan, berarti Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan cara melaksanakan administrasi sekolah dengan seluruh substansinya. Di samping itu Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas pendidikan. Oleh karena itu sebagai pengelola, Kepala Sekolah memiliki tugas untuk mengembangkan kinerja para personal (terutama para guru) ke arah profesionalisme yang diharapkan.

a. Pengelolaan

Suatu proses yang ada pada dasarnya meliputi pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, tanah, gedung serta pemilikannya

b. Penilaian

- 1) Penilaian pendidikan dasar diselenggarakan untuk memperoleh keterangan tentang proses belajar mengajar dan upaya pencapaian tujuan pendidikan dasar dalam rangka pembinaan dan pengembangan, serta untuk penentuan akreditasi pendidikan dasar yang bersangkutan
- 2) Penilaian sekolah menengah dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka.

Tujuan penilaian pada dasarnya untuk:

- a) Memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya
- b) Dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi sekolah menengah yang bersangkutan.

pengembangan dilaksanakan dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan.

Walaupun dalam berbagai hal penyelenggara sekolah diatur dan ditentukan oleh pemerintah, tetapi secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal peraturan pemerintah, kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggara kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Dengan demikian kepala sekolah berkewajiban untuk selalu membina, dalam arti berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan lebih baik.

Kepala sekolah, berkaitan erat dengan keberhasilan suatu sekolah, yaitu pembinaan program pengajaran sumber daya manusia, kesiswaan, sumber daya material dan pembinaan hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat.

3. Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah

Kepala Sekolah di satu pihak ia adalah orang atasan karena ia diangkat oleh atasan. Di pihak lain ia adalah wakil guru atau staf. Sebagai seorang atasan, ia mempunyai tanggung jawab sebagai tangan kanan atasan untuk

- 7) Mengatur pencatatan kemajuan pelajaran murid.
 - 8) Mengatur usaha-usaha peningkatan perbaikan pengajaran (melaksanakan supervisi intern).
 - 9) Mengatur program pengisian waktu-waktu kosong karena guru berhalangan hadir.
- b. Mengatur kegiatan kesiswaan.
- 1) Mengatur penerimaan murid berdasarkan peraturan penerimaan murid baru.
 - 2) Mengatur program Bimbingan dan Penyuluhan.
 - 3) Mencatat kehadiran dan ketidakhadiran guru/murid.
 - 4) Mengatur program ko-kurikulum (Pramuka, UKS dan lain-lain).
 - 5) Mengatur mutasi (kepindahan) murid.
- c. Kegiatan mengatur personalia.
- 1) Menginventarisasi personalia.
 - 2) Mengusulkan formasi guru dan merencanakan pembagian tugas-tugas guru, termasuk menghitung beban kerja guru.
 - 3) Mengusulkan pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan guru dan administrasi kepegawaian lainnya.

- 2) Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan sekolah (kursi, meja, lemari, papan tulis, kapur, perlengkapan tata usaha atau alat tulis menulis kantor dan lain-lain).
- 3) Menyelenggarakan inventarisasi tanah, gedung dan perlengkapan sekolah, baik yang habis dipakai maupun yang permanen).

g. Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat.

- 1) Menyelenggarakan pembentukan dan secara kontinyu berhubungan dengan BP3.
- 2) Menerima dan memberikan pelayanan pada tamu.
- 3) Mewakili sekolah dalam hubungan kerja dengan pihak luar.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok itulah seorang Kepala Sekolah harus mampu melakukan pembagian dan pembedangan kerja dengan membentuk unit-unit kerja, sesuai dengan besar kecilnya sekolah yang dipimpinnya. Tugas itu termasuk kemampuan melakukan organisasi sekolah, yang diiringi dengan kemampuan menseleksi personil untuk ditempatkan dalam setiap unit kerja. Kegiatan itu merupakan kegiatan managerial, yang menyangkut kemampuan mendaya gunakan personal secara efektif. Selanjutnya bilamana kegiatan sudah berlangsung, Kepala Sekolah berkewajiban menggerakkan setiap personal agar bersedia dan sungguh-

peserta didiknya, sesuai dengan kondisi masing-masing peserta didik tersebut.

- c) Hendaknya pendidik memperhatikan peserta didik yang lemah dengan memberikannya pelajaran yang mudah dan jelas, dan tidak menghantuinya dengan hal-hal yang serba sulit dan dapat membuatnya kehilangan kecintaan terhadap pelajaran. Artinya dengan kebijaksanaannya, pendidik hendaknya memahami kondisi setiap peserta didiknya dan menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan individu yang berbeda satu sama lain.

Di samping hal tersebut di atas, Kepala Sekolah hendaknya sering memberikan pengertian akan ciri-ciri seorang tenaga pendidik yang baik sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, yaitu:

- 1) Senantiasa menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., ke dalam jiwa peserta didik.
- 2) Senantiasa memberikan contoh (suri tauladan) yang baik terhadap peserta didik.
- 3) Senantiasa mencintai peserta didik layaknya mencintai anak kandungnya sendiri.
- 4) Senantiasa memahami minat, bakat dan jiwa peserta didik.

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah, Kepala Sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien.

b. Kepala Sekolah Sebagai Manajer

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan usaha anggota organisasi serta pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ada tiga hal yang patut diperhatikan dari definisi ini; yaitu proses, pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.³¹

³¹Robert G Murdick, *Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern*, (Jakarta; Erlangga, 1984),

dan penilaian masing-masing komponen tersebut merupakan komponen yang dapat membentuk suatu proses transformasi manajemen. Administrasi sangat diperlukan karena kegiatan di sekolah tidak terlepas dari pengelolaan yang bersifat pencatatan dan pendokumentasian seluruh program sekolah. Memahami dan mengelola kurikulum, kesiswaan, personalia, keuangan, sarana dan prasarana, dan administrasi hubungan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan secara efektif agar administrasi sekolah dapat tertata dan terlaksana dengan baik.

Kemampuan Kepala Sekolah sebagai administrator diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi pembelajaran, bimbingan dan konseling, kegiatan praktikum, kegiatan di perpustakaan, data administrasi peserta didik, guru, pegawai TU, penjaga sekolah, teknisi dan pustakawan, kegiatan ekstrakurikuler, data administrasi hubungan sekolah dengan orang tua murid, data administrasi gedung dan ruang dan surat menyurat.

Kepala Sekolah sebagai administrator dalam hal ini juga berkenaan dengan keuangan, bahwa untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan

anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya.

Masalah keuangan adalah masalah yang peka. Oleh karena itu dalam mengelola bidang ini Kepala Sekolah harus hati-hati, jujur dan terbuka agar tidak timbul kecurigaan baik dari staf maupun dari masyarakat atau orang tua murid.

Banyak keperluan sekolah yang harus dibiayai, dan semakin banyak pula biaya yang diperlukan. Dalam hal ini Kepala Sekolah harus memiliki daya kreasi yang tinggi untuk mampu menggali dana dari berbagai sumber, diantaranya dapat diperoleh misalnya dari siswa atau orang tua, masyarakat, pemerintah, yayasan, para dermawan dan sebagainya. Disamping itu Kepala Sekolah juga harus mampu mengalokasikan dana atau anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan sekolah / madrasah.³⁴

d. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor

Sebagai supervisor, Kepala Sekolah bertugas untuk mengarahkan perhatiannya kepada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. Di samping itu Kepala Sekolah juga berfungsi membina pertumbuhan profesi guru

³⁴Opcit, Soewaji Lazaruth....., 26.

dalam arti luas termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar-mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implemementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran, dan sebagainya.

Kepala Sekolah juga harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif untuk mencegah agar para tenaga pendidik tidak melakukan penyimpangan dan lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala Kepala Sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan meliputi kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya

menyadarinya dalam proses kerja sama untuk mencapai tujuan. Kepala Sekolah juga mampu memberikan dorongan kepada anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan.

- 3) *Knowledge*. Suatu kelompok akan menaruh kepercayaan pada pemimpin apabila mereka menyadari bahwa otoritas kepemimpinannya diperlengkapi dengan skop pengetahuan yang luas dan mampu memberikan keputusan yang mantap. Elsbree mengutip pernyataan Robert L. Peabody yang membuktikan bahwa guru-guru sekolah dasar cenderung lebih menghargai kekuasaan yang bersumber pada kompetensi administrator ketimbang karena kedudukan saja.
- 4) *Professional skill*. Profesional skill boleh jadi terbentuk sepanjang hidup seseorang dan merupakan fungsi dari nilai-nilai, pengertian dan pengalaman seseorang. Perbedaan-perbedaan nilai antara guru dan Kepala Sekolah mempengaruhi kepercayaan guru itu terhadap kepemimpinannya. Perbedaan nilai tersebut akan terasa dalam hubungan antar pribadi di sekolah.

2.1 Pola kerjasama program pemagangan/PKL

Kombinasi pembelajaran teori diruang kelas dan perpustakaan dan pembelajaran praktek di lab dirancang sedemikian rupa dalam rangka menghasilkan lulusan dengan tingkat mutu tertentu yang siap memasuki dunia kerja. Keberhasilan pendidikan vokasi tidak hanya di ukur dari segi mutunya saja melainkan juga dari segi relevansinya. Hubungan mutu dan relevansi ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Mutu lulusan pendidikan vokasi dianggap relevan oleh para pengguna lulusan, yang dalam hal ini adalah sektor dunia usaha dan dunia industri (DUDI) apabila apa yang mereka dapatkan sama dengan atau lebih besar dari yang mereka harapkan. kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya, dimana DUDI menilai bahwa lulusan pendidikan vokasi belum siap kerja, banyak pre-rekrut menghadapi dilema dimana banyak pelamar yang memiliki potensi tinggi harus direlakan untuk tidak diseleksi lebih lanjut karena tidak memiliki pengalaman kerja yang relevan sebagaimana seringkali diminta pada iklan-iklan lowongan kerja. Sekarang dan kedepan, para penyedia kerja mengharapkan dari pada lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan dari bidang studi atau keahliannya saja, tetapi juga kemampuan adaptasi

kebutuhan kompetensi yang bisa mendorong kemajuan industri dari sisi kemampuan sumber daya manusia minimal untuk tingkat pelaksana (operator) industri. Yang pada akhirnya industri akan tumbuh dan berkembang melalui penambahan kompetensi, dan sekolah bisa menjamin pola pelatihan, peralatan yang tersedia dan para pengajar memiliki kemampuan. Untuk memberikan kepercayaan kepada industri pola ini akan dibuat secara detail dan terinci dalam *Guide line* pelatihan, Dan akan dilindungi dengan payung MoU yang lebih jelas.

Proses pelaksanaan akan ditangani secara profesional oleh unit pelaksana teknis produksi dan training dibawah bidang kerjasama dan pelayanan industri di setiap sekolah kejuruan (SMK).

2.3. Pola kerjasama program produksi.

Pola kerjasama dalam bidang produksi adalah suatu upaya dalam implementasi kurikulum, Dengan metode *Production Base Education* (PBE), dengan harapan untuk lebih mempertajam kompetensi yang didapatkan dari para siswa, hal ini bisa dilakukan apabila set-up peralatan disarana lab. Dan bengkel memadai untuk melakukan kegiatan produksi disamping tuntutan kompetensi para pengajar yang paling tidak setara dengan para supervisor industri. Baik secara *hard skill* ataupun *soft skill*.

Pola inilah nanti yang bisa disebut dengan *teaching factory*, dan bisa berjalan dengan efektif apabila pihak sekolah mampu meyakinkan industri disekitarnya untuk menjadi mitra dalam kegiatan produksi dan sekaligus menjadi vendor dan industri sekitarnya. Proses pelaksanaan akan di tangani secara profesional oleh unit pelaksanan teknis produksi dan training dibawah bidang kerjasama dan pelayanan industri disetiap sekolah kejuruan (SMK).

2.4 Pola Kerjasama Program Penyaluran Lulusan

Pola kerjasama program penyaluran lulusan adalah ujung tombak dari seluruh program. Karena inilah yang akan menjadi tolak ukur dari keberhasilan dalam proses akhir dari kegiatan pembelajaran dengan harapan bahwa semua *output* dan *outcome*, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan kerjasama industri kemitraan dalam proses recruitmen lulusan, hal ini harus dilakukan dengan inisiatif dari pihak sekolah menyampaikan data dan kompetensi dari lulusan dan bisa memberikan jaminan bahwa lulusan yang akan disalurkan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan standart kebutuhan industri, baik secara *Knowledge Skills dan Attitude*. Proses pelaksanaan akan ditangani secara profesional oleh unit pelaksana teknis PKL dan

penyaluran, dibawah bidang kerjasama dan pelayanan industri disetiap sekolah kejuruan (SMK).

2.5 Pola Kerjasama Bantuan Program Peningkatan Pembelajaran

Pola kerjasama bantuan program peningkatan pendidikan yang dimaksud adalah bentuk kontribusi dari perusahaan terhadap sekolah dproi alam rangka menunjang program pembelajaran disekolah sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan oleh perusahaan. Program ini lebih ke arah kemitraan, sehingga setelah menyelesaikan studinya siswa diharapkan dapat bekerja pada perusahaan tersebut.

3. Tujuan Pengembangan Bidang Kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan

Tujuan pengembangan bidang kerjasama di SMK adalah untuk mempercepat waktu penyesuaian bagi lulusan Sekolah Kejuruan dalam memasuki dunia kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu sekolah menengah kejuruan. Pelaksanaan kerjasama sekolah dengan dunia kerja merupakan suatu strategi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada disekolah dalam rangka mengembangkan sekolah. Dalam hal mengembangkan kerjasama antara sekolah dengan industri, sekolah harus bersikap bahwa sekolah lebih berkepentingan, dengan sikap seperti ini, sekolah harus mengambil inisiatif mendekati industri, juga yang perlu

mungkin diwakili oleh pihak asosiasi industri atau lembaga profesi dengan lembaga pemerintah yang lebih tinggi, yaitu dinas pendidikan di masing-masing wilayah setingkat provinsi yang diterjemahkan sebagai MoU induk atau payung hukum yang lebih besar, dan pada setiap unit kerjasama, akan dilanjutkan dengan MoU ditingkat sekolah kejuruan (SMK) dengan masing-masing industri sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Selain itu kerjasama sekolah dan industri tercantum dalam :

1. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan No.080/U/1999 tentang program pendidikan dan kerja lapangan
2. Undang-Undang republik indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Permendiknas RI No.23 Tahun 2006 tentang Standart Kompetensi isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. SMK sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 15 UU Sisdiknas, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama bekerja dalam bidang tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian⁴⁴.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian deskriptif kualitatif karena penelitiannya diarahkan untuk mendeskripsikan keadaan obyek atau peristiwa⁴⁵. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh pemahaman yang otentik mengenai pengalaman orang-orang sebagaimana dirasakan orang-orang bersangkutan. Pengamatan berperan-serta dan wawancara mendalam (dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka) dianggap metode yang potensial untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bahwa tidak ada hipotesis yang spesifik pada saat penelitian dimulai, hipotesis justru dibangun selama tahap-tahap penelitian, setelah diuji atau di konfrontasikan dengan data yang diperoleh peneliti selama penelitian tersebut⁴⁶.

⁴⁴Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 145

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 206

⁴⁶Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif.....*, 156

teknik ini digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk dapat mengumpulkan data tentang Peran Kepala Sekolah dalam Pengembangan Bidang Kerjasama di SMK Bubutan Surabaya.

- c. *Triangulation* atau melihat sesuatu dari berbagai sudut. Dengan metode tersebut persoalan Peran Kepala Sekolah dalam Pengembangan Bidang Kerjasama di SMK Bubutan Surabaya tidak hanya dikaji dari sudut pandang Kepala Sekolah saja tapi juga dari data diluar kepala sekolah.
- d. *Pear Debriefing* atau pengecekan sejawat dilakukan oleh peneliti dengan jalan meminta kepada koleganya (bukan partisipan yang mengetahui lapangan tempat penelitian). Dalam penelitian ini peneliti sering meminta informasi, masukan atau ide tentang obyek penelitian baik dari teman kuliah maupun melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.
- e. *Negative case analysis* atau kajian kasus negatif adalah prosedur analisis yang digunakan oleh peneliti untuk menghaluskan kesimpulan-kesimpulan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan penelaahan berulang-ulang atas uraian hasil penelitian dan analisis hasil yang dicocokkan antara aspek pada bab pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian. Jika ditemukan hal yang tidak sesuai antara

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum

a. Sejarah Berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan Bubutan Surabaya.

SMK Bubutan adalah sekolah Swasta yang berada di Jl. Bubutan No. 85-87 Surabaya, dan berdiri pada Tanggal 5 Januari 1975. Letak Geografis Sekolah Menengah Kejuruan Bubutan Surabaya

Secara teritorial SMK Bubutan Surabaya berada di tengah keramaian kota. Dan berbatasan dengan daerah-daerah yang ramai pula. Lebih jelasnya penulis uraikan dibawah ini:

Sebelah utara : Kec Krembangan

Sebelah timur : Rumah padat penduduk

Sebelah selatan : Gedung Penyebar semangat

Sebelah barat : Benowo

Keterangan : Data diambil dari dokumentasi SMK Bubutan Surabaya⁶⁰

b. Visi dan Misi

Visi SMK Bubutan Surabaya adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Wawancara dengan Kepala Sekolah, Selasa 07 Juni 2011, jam 09.00 WIB

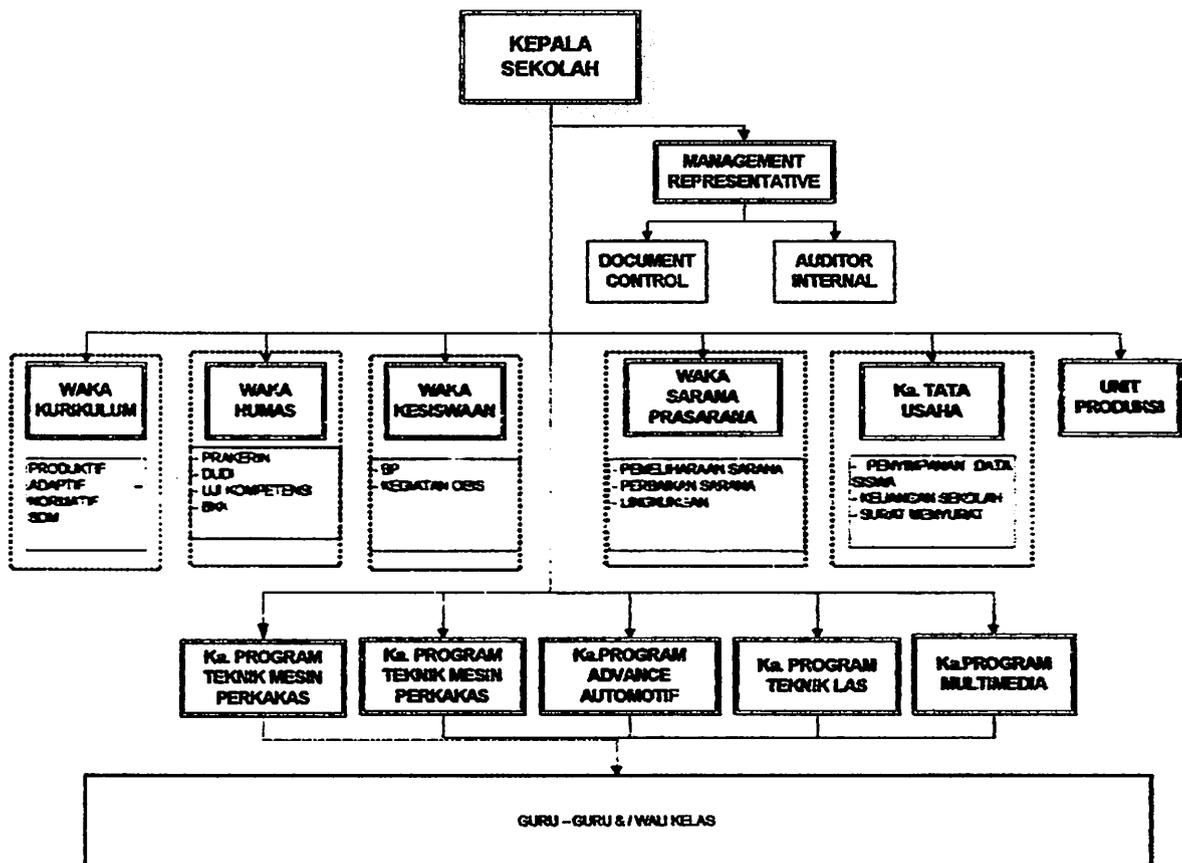
TABEL. 1⁶¹

STRUKTUR ORGANISASI SMK BUBUTAN SURABAYA

TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

Tabel III

Struktur Organisasi Pada SMKN I Tuban Tahun 2010/2011



(sumber data: dokumen SMK Bubutan Surabaya tahun 2010/2011)

d. Data Guru, dan Data Siswa

1) Data Guru

⁶¹ Data diambil dari dokumentasi SMK Bubutan Surabaya

	Mardikaningrum,B A Urusan Sar.Prasarana										
4	Drs.Sumarno,MM Waka Hubungan Industri	Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	2	2	2	2	2	2	32
		Fisika	2	2	2	2	2	2	2	2	
5	Drs.Mawahib,MM Wali kelas XI TKR 1	Pendidikan agama islam	2	2	2	2	2	2	2	2	26
		Pengembang an diri(Hafid Al-qur'an				2	2	2	2	2	
6	Drs.M.Ghozali,MM Wali kelas XII MO	Ilmu Pengetahuan sosial				2	2	2	2	2	26
		Kewirausaha an	2	2	2				2	2	
		Pengembang an diri(Hafid Al-qur'an	2	2	2						
7	Yoyok Purnomo,S.pd	Pendidikan jasmani	2	2	2	2	2	2	2	2	16
8	Drs.Ach.Said Winarto MM	Produktif teknik pemesinan	4			2			2		24
		Produktif teknik		2	2						

		Otomotif									
		Praktek Teknik Pemesinan	6			6					
9	Drs.Bambang Wali kelas XII TPm	Teori produktif pemesinan				4			4		30
		Teori produktif Teknik otomotif					2	2			
		Praktek pemesinan	10			8					
10	Drs.Nahor Leo,Mth	Pendidikan agama kristen	2			2			2		6
11	Drs.Srud	Matematika	4	4	4						12
12	Bondan Baskoro,ST	Teori KKPI	2	2	2	2	2	2	2	2	26
			2	2	2				2	2	
13	Dra.Handayani	Kewirausahaan				2	2	2			12
		Seni Budaya	2	2	2						
14	Karyati,S.pd	Bahasa Indonesia	2	2	2	2					8
15	Ir.Bambang Sugiarto	Praktek Teknik Otomotif/TKR					15	15		10	40

16	Rusman,S.pd,MM (wali kelas XI TKR 2	Matematika				2	2	2	4	4	14
17	Vita Rositawati,S.pd (wali kelas XI TPm	Bahasa inggris	2	2	2	4	4		4	4	22
18	Ainun Rahmah,S.pd.MM wali kelas X TKR-1	Bahasa Indonesia					2	2	2	2	8
19	Riche Ayu,S.pd	Kimia	2	2	2	2					8
20	Budi Raharjo,S.pd Wali kelas X TKR- 2	Teori Produktif otomotif/TK R		2	2		6	6		4	44
		Praktek produktif teknik otomotif					12	12			
21	Farid Mujayin,Spd Wali kelas X TPm	Teori produktif teknik pemesinan	4			6			4		36
		Teori produktif teknik otomotif		2	2						
		Praktek	10			8					

TABEL.3⁶²**DAFTAR SISWA SMK BUBUTAN SURABAYA****TAHUN AJARAN 2010/2011**

Kelas	Jumlah Siswa
X Tpm	32
XTkr1	46
XTkr2	46
X1Tpm	38
X1Tkr1	35
X1Trm2	28
X1Tpm	49
X1Tpm	46

3) Keadaan Fisik dan Fasilitas Sekolah

Keadaan fisik SMK Bubutan Surabaya tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah lain. Bangunan sekolah terdiri dari dua lantai. Fasilitas sekolah di SMK Bubutan Surabaya cukup memadai. Berikut data umum SMK Bubutan Surabaya.

⁶² Data diambil dari dokumentasi SMK Bubutan Surabaya

TABEL 4⁶³**KEADAAN FISIK DAN FASILITAS SMK BUBUTAN SURABAYA TAHUN****AJARAN 2010/2011****Data Umum Sekolah**

Nama Sekolah : SMK Bubutan

Kecamatan : Bubutan

Kelurahan : Bubutan

Tahun Pembangunan : Februari 2004 (Pembaharuan ke – 2 oleh
Bank Mandiri)

Tipe Bangunan : Bertingkat

Data Lahan Dan Pemanfaatan Lahan Sekolah

No	Deskripsi	Penjelasan	Luas (m ²)	Keterangan
1	Bentuk Lahan	Segi Panjang		Pemkot-Sewa
2	Status Lahan	Negara	628 m ²	
3	Sarana Prasarana Bangunan Pada Lahan Sekolah		Luas rata2 (m2)	Luas Total (m2)
A	Ruang Kelas	14 Ruang	56	784
B	Ruang Kepala Sekolah	1Ruang	56	56
C	Ruang Guru	1Ruang	56	56

⁶³ Data diambil dari dokumentasi SMK Bubutan Surabaya

Uraian di atas, sesuai dengan landasan hukum yang dipergunakan oleh lembaga Sekolah Menengah Kejuruan dalam praktek sistem ganda, Landasan tersebut yaitu:

Pelaksanaan sistem ganda pendidikan menengah kejuruan khususnya SMK Bubutan Surabaya didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional, PP no.29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah, PP no. 39 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional, Kepmendikbud No.0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan dan kepmendikbud No.080/U1993 tentang kurikulum SMK.

Hal ini dibuktikan dari dokumentasi sekolah yang tertuang dalam dokumentasi KTSP nya yang juga menunjukkan landasan hukum dalam bidang kerjasama di Sekolah Menengah Kejuruan.

Pendidikan di SMK lebih dikenal dengan pendidikan sistem ganda yang dimaksud pendidikan sistem ganda seperti yang diuraikan oleh kepala sekolah SMK Bubutan Surabaya adalah:

Sistem ganda merupakan konsep untuk memadukan antara program sekolah dengan penguasaan keahlian yang di laksanakan

Setelah peneliti mengumpulkan data yang terkait dengan pengembangan kepala sekolah dalam bidang kerjasama seperti, kepala sekolah juga mengajukan proposal ke DEPNAKER untuk menacri jaringan kerjasama dengan dunia industri untuk menempatkan siswa SMK Bubutan melakukan PSG di industri yang telah di tentukan oleh DEPNAKER. Sehingga ada dua cara yang dilakukan kepala sekolah dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan industri yaitu kepala sekolah langsung mengajukan proposal ke pihak industri dan yang kedua kepala sekolah mengajukan proposal ke dinas ketenagakerajaan (DEPNAKER).

Program kerjasama yang dilakukan kepala sekolah SMK Bubutan Surabaya adalah siswa mempunyai waktu selama 3 bulan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan, mereka di tempatkan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dan perusahaan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah seperti, program keahlian Teknik mesin, Perkakas dan mekanik otomotif.

Kepala sekolah juga mempunyai langkah-langkah dalam melaksanakan bidang kerjasama di SMK Bubutan sebagai berikut:

- Kepala sekolah memberi surat pengantar kepada pihak industry guna menyerahkan siswanya secara resmi kepada pimpinan praktek kerja.
- Memberikan jaminan asuransi kepada masing-masing siswa untuk menjaga keamanan dan ketentraman peserta didik.
- Kepala sekolah menunjuk guru untuk menjadi monitoring
- Membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak

Karena Sekolah adalah sebuah organisasi. Di dalam sekolah terdapat struktur organisasi, mulai kepala sekolah, wakil kepala, dewan guru, staf, komite sekolah, dan tentu saja siswa-siswa. Dalam sekolah terdapat kurikulum dan pembelajaran, biaya, sarana, dan hal-hal lain yang harus direncanakan, dilaksanakan, dipimpin, dan diawasi. Semuanya itu bermuara pada hubungan kerja sama atau *human relation*.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam bidang kerjasama di SMK Bubutan Surabaya

Faktor pendukung keberhasilan pekerjaan sangatlah penting. Tidak terkecuali pengembangan bidang kerjasama yang ada di sekolah. Dengan adanya faktor pendukung tujuan pengembangan bidang kerjasama akan dapat dicapai lebih cepat, baik dan efektif. Setidaknya hal itu yang dirasakan oleh kepala sekolah SMK Bubutan Surabaya. Adapun Faktor pendukung dalam pengembangan bidang kerjasama di SMK Bubutan Surabaya, yaitu: *pertama*, Pemerintah mempunyai faktor pendukung utama yang memberikan rekomendasi kepada seluruh SMK yang ada di Indonesia bahwa syarat utama untuk mengikuti Ujian Nasional adalah kerja magang selama 3 bulan dengan nilai yang baik.

Kedua, faktor guru mempunyai posisi yang penting dalam kerjasama yaitu dilihat dari keterlibatan dan kesolidaritasan guru dalam menyiapkan, membimbing dan memantau proses kerjasama.

Ketiga, faktor industri dengan banyaknya para pengusaha yang ikut memperhatikan pendidikan sehingga memudahkan kepala sekolah menjalin hubungan kerjasama guru, mempunyai persyaratan kelulusan anak didik.

Keempat, adalah faktor orang yang paling utama dalam menentukan baik dan buruknya sebuah kerjasama dimana baik dan buruknya sekolah dapat dilihat dari praktek yang dilaksanakan oleh siswa sehingga sangat memungkinkan bagi mereka untuk terus menajalani praktek diperusahaan tersebut dengan peran sebagai pegawai.

Sebagaimana halnya faktor pendukung, faktor penghambat dalam setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang harus pula diketahui. Hal itu dimaksudkan agar setiap hambatan dapat dicarikan solusi terbaiknya, sehingga tujuan dari usaha yang dilakukan tidak menjadi lambat atau gagal sama sekali. Dalam usaha Peran Kepala Sekolah dalam pengembangan bidang kerjasama SMK Bubutan Surabaya, tentunya tidak luput dari faktor-faktor yang menghambat jalannya proses pengembangan bidang kerjasama. Hal itu pula yang dirasakan oleh setiap Kepala Sekolah SMK Bubutan Surabaya, yaitu: *Pertama*, Sekolah adalah tempat bertemunya guru dan murid yang kadang bisa menjadi penghambat dalam bidang kerjasama. Apabila seluruh guru tidak mempunyai tujuan yang sama dalam suatu pencapaian (kerjasama) maka hal tersebut akan sulit untuk diwujudkan.

Kedua, faktor penghambat siswa yang setelah terjun dilapangan tidak mematuhi kode etik/peraturan yang telah menjadi kesepakatan maka hal tersebut juga sangat berpengaruh dalam citra kerjasama kepala sekolah.

Ketiga, Pada zaman dewasa ini persaingan global yang semakin meningkat hingga kebanyakan orang menyampingkan arti pendidikan dimana para pengusaha saling bersaing dalam pasar global hingga mempersulit suatu sekolah untuk menjalin hubungan kerjasama, itulah yang menjadi penghambat terciptanya kerjasama antara sekolah dan pihak industri.

Keberhasilan sekolah dalam pengembangan bidang kerjasama di SMK Bubutan Surabaya sangat ditentukan oleh peran kepala sekolah yang mengoordinasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan semua sumber daya pendidikan. Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang akan menentukan usaha apa yang di lakukan dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan di sekolah dan praktek industri, Kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang di pikirkan oleh orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah di tuntutan untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah, orang tua siswa, masyarakat, dan perusahaan/industri guna mewujudkan tujuan pendidikan yang efektif dan efisien sesuai tuntutan zaman.

